

ABSTRAK

Kemudahan investasi di sektor EBT merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menggaet investasi demi memenuhi target bauran EBT dan komitmen *net zero emission*. Melalui kebijakan *priority investment list* investor dapat memperoleh kemudahan dalam berinvestasi di sektor EBT yaitu dengan diberikannya insentif fiskal berupa *tax allowance* atau *tax allowance*. Penelitian ini meneliti tentang kemudahan investasi sektor EBT melalui kebijakan *priority investment list* untuk mendukung bauran energi nasional dengan menganalisis dan memperdalam pemahaman terkait regulasi serta pelaksanaan kemudahan investasi di sektor EBT. Kenyataannya hingga saat ini target bauran EBT 2025 dalam bauran energi nasional yang diatur dalam KEN masih belum tercapai. Diteliti dengan metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwasannya proses kemudahan investasi berupa pemberian insentif fiskal juga perlu memperhatikan berbagai regulasi hukum di sektor keuangan dan energi. Selain itu, terdapat peran regulator-regulator yang membuat peraturan hukumnya cukup kompleks. Tidak hanya itu, terdapat tantangan dari aspek kebijakan investasi dan aspek bidang usaha EBT yang memerlukan pembiayaan jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut perlu adanya regulasi kuat dan koordinasi aktif antar regulator penanaman modal sektor EBT.

Kata Kunci: *Kemudahan Investasi, EBT, Regulasi Hukum*